

DAKWAH MELALUI BAHASA : ISLAMISASI KONSEP AGAMA

Oleh: Zainal Fikri^{*}

Abstract :

Doing dakwah in its trilogy methods: by speaking, writing, and by example involves a meaning to construct a new concept in a language. Dakwah through a language as a medium of thought could be done by Islamization of a concept. In this essay I examine how Moslems, particularly intellectuals, constructed the concept of "agama"—the term "religion— in bahasa. They defined the concept by inserting what I call as Islamic elements such as God, Prophet, Holy Book, and rites. Although they failed to impose the strict definition of the concept, they did succeed in limiting the number of religions that could be recognized by the state (Indonesia).

Key words : Concept, language, civil religion, and dakwah.

A. Pendahuluan

Dalam tulisan ini saya akan melihat bahasa sebagai medium dakwah yang bekerja pada trilogi metode dakwah. Trilogi metode dakwah, yakni *bi al-kitabah*, *bi al-lisan*, dan *bi al-hal*, menurut saya, yang kedua dan pertama menggunakan bahasa verbal dan tulis sebagai medium sekaligus memberi makna. Sedangkan yang ketiga menghubungkan bahasa dan makna dalam kehidupan nyata. Islamisasi pemikiran yang menjangkau semua kalangan adalah melalui Islamisasi bahasa. Karena bahasa adalah dipakai semua orang yang berpikir dalam maknanya yang luas. Jadi, mengislamkan bahasa adalah salah satu usaha dakwah yang komprehensif.

^{*} Zainal Fikri, dosen tetap Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, menyelesaikan MA Filsafat Barat di University of Nottingham England tahun 2004.

Kalau kita mengambil bahasa Arab sebagai contoh medium dakwah ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk mengajak manusia ke jalan Allah, maka bahasa menjadi kajian menarik dalam pengembangan dakwah. Wahyu Quran menggunakan medium bahasa Arab. Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa Quran secara lafaz dan makna berasal dari Tuhan. Yang menarik adalah bagaimana hubungan Tuhan dengan bahasa Arab? Apakah Tuhan ketika menggunakan bahasa Arab juga menggunakan makna yang sudah tersedia yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab? Atau, apakah Tuhan menciptakan makna baru yang belum pernah dipakai oleh orang Arab sebelumnya? Atau, apakah Tuhan tetap menggunakan kata yang biasa dipakai orang Arab? Namun Tuhan kemudian menambahkan unsur-unsur baru. Kata "shalat" misalnya, baik makna dan unsur-unsurnya sudah ada sebelum perintah shalat turun. Ketika perintah shalat turun, banyak unsur baru yang masuk, misalnya unsur gerakannya adalah baru; dimulai dengan *takbir* dan ditutup dengan *salam*. Dalam tulisan ini saya mengambil hubungan yang terakhir sebagai teori Islamisasi bahasa.

Fokus saya pada tulisan ini adalah konstruksi konsep "agama" yang berasal dari bahasa Sansekerta menjadi bermakna Islam atau tegasnya Islamisasi konsep tersebut. Konstruksi konsep ini telah berimplikasi kepada perumusan objek dakwah yang kontroversial, yakni "dakwah terhadap orang yang sudah beragama." Saya akan melihat kenapa konsep "agama" menjadi isu yang masuk ke dalam salah satu unsur dakwah tersebut. Apa yang dimaksud dengan "agama"?

B. Konsep

Sebelum masuk ke dalam pembahasan konsep "agama" dan unsur-unsurnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan "konsep." Pembahasan tentang konsep masuk ke dalam kajian cabang filsafat yang disebut dengan logika. Logika terkait dengan bahasa. Makna kata atau konsep dalam bahasa bersifat dinamis, sedinamis para pemakai bahasa. Bagaimana kita menyatakan bahwa kita sebagai pemakai bahasa mempunyai suatu konsep? Ada empat jawaban terhadap pertanyaan seperti ini, yakni

bahwa (1) seseorang mengetahui konsep apabila ia tahu arti suatu kata; atau (2) dapat menggunakan kata; atau (3) dapat membedakan suatu kata dari kata-kata yang lain; atau (4) kriteria-dalam-pikiran (Hospers 1990: 37-39). Manusia tidak hanya bertindak sebagai pemakai bahasa dan berpikir dengan bahasa yang sudah tersedia, tapi juga memberi makna atau unsur-unsur baru ke dalam suatu kata, baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis.

Membuat definisi atau analisis adalah proses mengurai konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana, sedemikian rupa sehingga struktur logisnya menjadi jelas. Analisis filosofis merupakan metode untuk menguji, menilai, dan memahami sistem pemikiran yang kompleks dengan memecahnya ke dalam unsur-unsur yang lebih sederhana sehingga hubungan antar unsur-unsur itu menjadi jelas. Metode ini mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 1930-an kaum positivis (*logical positivists*) mengembangkan metode analisis logis dalam konteks anti-metafisika. Setelah tahun 1945 para filosof mengembangkan analisis untuk memahami bahasa dan pemikiran. Mereka mengembangkan konsepsi 'analisis linguistik' yang lebih luwes. Perhatian utama mereka adalah analisis bahasa dan makna (Baldwin, 2000: 29).

Konsep yang bisa dianalisis atau didefinisikan adalah konsep yang kompleks, seperti kata "kuda." Kuda disebut kompleks karena terdiri dari beberapa unsur *properties*, misalnya, kepala, badan, kaki, dan lain-lain serta unsur sifat, misalnya, meringkik. Kalau konsepnya sederhana, maka tidak bisa diurai ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Ketika kita menganalisis suatu konsep atau kata yang kita lakukan adalah: (1) menguraikan unsur-unsurnya, dan (2) melihat hubungan unsur-unsur itu.

Apa hubungan analisis dan definisi? Ketika melakukan analisis kita juga membuat definisi. Analisis adalah satu cara membuat definisi yang menuntut pemikiran filosofis. Cara lain membuat definisi adalah dengan melihat kamus atau definisi leksikal. Kita bisa juga membuat definisi dengan cara menunjuk, memperlihatkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang kita definisikan –dengan menunjuk pakai telunjuk ke objeknya, misalnya–disebut

definisi *ostensif*. Kemudian ada definisi dalam penggunaan atau dapat menggunakan kata dalam bahasa yang benar. Selanjutnya, ada definisi dengan paradigma. Analisis dan definisi adalah satu keluarga. Keluarganya yang lain adalah eksplikasi, deskripsi, klasifikasi, dan memberi makna: "Definition and analysis are, however, closely related, in a family whose other members include explication, description, classification, and what philosophers loosely call 'making sense' and 'giving an account'. It might be that these last two convey the inclusive notion, with the others as different members" (Grayling, 1997: 174-175). Yang dimaksud dengan eksplikasi konsep adalah proses menjelaskan konsep tanpa memberikan definisi eksplisit, misalnya hanya menggambarkan fungsinya atau meletakkannya dalam peta intelektual.

C. Konstruksi Konsep "Agama"

Kata "agama" berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Atkinson, agama mempunyai asosiasi dengan melek hurup (*literacy*), kekuasaan, kekayaan, sopistikasi, dan tradisi di luar pengalaman masyarakat-masyarakat lokal (1987: 175). Hubungan gagasan agama dengan Islam terbentuk secara historis. Kondisi sosial dan politik mempengaruhi terbentuknya konsep agama dalam benak para pengguna kata itu. Pertama, Islam yang disebut sebagai agama merupakan "ahlul kitab". Hal ini menekankan hubungan antara gagasan agama dengan *learning* dan *literacy*. Kedua, Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang. Para pedagang Muslim mengkonsolidasikan gagasan agama dengan sifat kaya dan kosmopolitan. Ketiga, hubungan antara agama dan kekuasaan (*political authority*) diperkuat ketika para penguasa lokal masuk Islam.

Pada masa awal berdirinya negara Indonesia, secara resmi unsur monoteisme dimasukkan dalam konsep agama. Islamisasi konsep agama melalui jalur konstitusional pada awal kemerdekaan RI dilakukan oleh para tokoh Islam melalui perumusan huruf-perhuruf kata-kata dalam Undang-Undang Dasar (UUD), ada upaya untuk memasukkan kata "Allah" dalam Pembukaan UUD. Sebelum disetujui, draft pembukaan memuat kata Allah

dalam paragraf ke-3: "Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Draft ini dibacakan oleh Soekarno, Ketua Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada acara Pengesahan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Namun usaha memasukkan kata Allah ini tidak berhasil karena anggota PPKI bernama I Gusti Ketut Pudja keberatan. Ia mengusulkan kata Allah diganti dengan "Tuhan" dan semua anggota mufakat. Akhirnya disepakati bunyinya menjadi: "Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa." Walaupun demikian, unsur monoteisme dalam Pembukaan secara eksplisit dicantumkan pada paragraf akhir, yakni: "ke-Tuhanan Yang Maha Esa" (Sekneg 1995: 412-420).

Pada masa pasca-kemerdekaan, dari Pembukaan UUD '45 dan Pasal 29 ayat 1 dan 2, muncul usaha untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai "agama", dengan menghadirkan sejumlah kriteria. Sehingga muncul desakan dari sebagian tokoh Islam bahwa agama harus memiliki kriteria berikut: memiliki Tuhan Yang Esa, Rasul, Kitab Suci dan Ibadah atau Ritual. Penetapan kriteria itu lebih banyak mengambil unsur-unsur dari Islam, namun dalam penerapannya tidak bisa seketat yang diinginkan oleh mereka. Kompromi politik kemudian melahirkan istilah agama resmi atau agama yang diakui oleh negara, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Kompromi itu diperkuat oleh adanya Departemen Agama. Negara, melalui Departemen Agama, menyantuni lima agama tersebut. Di departemen ini hanya terdapat Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu/Buddha. Agama-agama suku, seperti Kaharingan (Dayak), Pelbegu (Batak), Alukta (Toraja), dan Towani (Bugis) mengidentifikasi diri mereka sebagai pengikut Hindu-Dharma. Hal itu harus mereka lakukan dengan terpaksa untuk dapat bertahan hidup dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Tapi tidak semua agama suku bersedia melakukan hal itu.

Namun, agama Yahudi, yang jelas-jelas ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan kriteria di muka, tidak dianggap sebagai agama yang diakui negara. Walaupun sejak zaman Belanda di Surabaya sudah berdiri sebuah Sinagog yang tetap ada hingga sekarang. Hal itu tercermin dari sikap keberatan terhadap delegasi agama-agama karena yang bersangkutan beragama Yahudi, walaupun bukan warga negara Israel.

Kemudian agama Kong Hu Cu yang dalam Undang-undang No.1/Pn. Ps./1965 diakui sebagai salah satu agama yang dipeluk bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya pada masa Orde Baru, pemeluk agama itu tidak diakui keberadaannya. Dalam pembuatan KTP, misalnya, agama Kong Hu Cu tidak dicantumkan sebagai agama, walau yang bersangkutan meminta untuk dicantumkan. Begitu juga penolakan dalam pendaftaran perkawinan. Dan dari Pasal 29 ayat 2 UUD '45 muncul usaha untuk memasukkan kepercayaan sebagai bagian dari pengertian agama. Yaitu, penafsiran yang menyatakan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan, dan aliran kepercayaan harus dikembalikan ke induknya (agama). Pihak yang keberatan terhadap tafsir ini berargumen bahwa tafsir itu tidak sesuai dengan realitas empirik spiritualitas bangsa Indonesia. Karena, di Indonesia banyak aliran kepercayaan yang tidak berpangkal pada induk agama. Bahkan ada Aliran Kepercayaan yang lahir sebelum agama-agama seperti Islam dan Kristen masuk ke Indonesia.

Pada level pemerintahan sebelum memangku jabatan, seseorang harus mengucapkan sumpah/janji ketika pelantikan, menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Jadi syarat "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" bagi seorang pejabat, diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit lima agama yang diakui Pemerintah. Walaupun kompromi itu dapat dicapai, sebagian tokoh Islam tetap pada pendirian bahwa Islam lebih dekat secara konstitusional dengan konsep monoteisme. Misalnya, Hamka berpendapat bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dari Pancasila lebih dekat kepada pendirian umat Islam Indonesia, jika dibandingkan dengan golongan agama yang lain, baik Kristen atau Hindu Bali. Islamlah yang mengakui Kesatuan yang mutlak. Karena itu, Umat Islam

sebagai kelompok mayoritas, dengan menjunjung tinggi Pancasila, akan lebih banyak dapat bergerak luas memajukan agama Islam dalam Negara Republik Indonesia. Umat Islam harus bersatu, agar Ketuhanan yang Maha Esa tidak ditafsirkan oleh yang memperserikatkan Allah dengan yang lain menurut penafsiran masing-masing (Rusydi Afif, 1983: 11-12).

Dengan demikian, sampai di sini kita dapat menyaksikan konstruksi konsep agama dan proses identifikasi makna agama dengan Islam telah berjalan melalui dua jalur. Pertama, jalur konversi besar-besaran penduduk Nusantara. Para penyebar Islam telah berdakwah melakukan Islamisasi masyarakat Nusantara, dan kedua, jalur konstitusional melalui perumusan UUD Republik Indonesia, dan berbagai persyaratan administratif.

D. Islamisasi Konsep Agama

Pada bagian ini saya akan membahas jalur ketiga konstruksi konsep agama dan proses identifikasi makna agama dengan Islam melalui jalur intelektual. Islamisasi istilah "agama" secara teoritis dan konseptual dilakukan oleh para intelektual Muslim. Para penulis Muslim umumnya menyatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sansekerta. Konsep agama yang berasal dari luar Islam itu mereka isi dengan kriteria Islam sehingga menjadi sangat berbeda dengan makna literal awalnya: "a" berarti tidak dan "gama" berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Pemberian kriteria Islam pada konsep agama membawa konsekuensi pada eksklusi keyakinan yang tidak sesuai dengan kriteria itu. Namun kriteria ini, sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak dapat sepenuhnya diterapkan secara resmi dalam lembaga negara, karena pemerintah telah mengakui Hindu dan Buddha sebagai agama resmi negara Indonesia, di samping Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan).

Saya akan menguraikan definisi agama yang banyak dipakai di lingkungan akademis, yakni dari Harun Nasution dan Sidi Gazalba. Harun Nasution menyatakan bahwa agama dalam bahasa Sankrit berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab suci. Ia

mengintrodukir unsur-unsur baru yang berasal dari Islam ke dalam definisi agama. Unsur-unsur itu adalah doktrin monoteisme dan Rasul (1985: 9-11).

Agama-agama yang dapat dimasukkan dalam kelompok agama monoteis, menurut Harun Nasution, adalah Islam, Yahudi, Kristen dan Hindu. Namun, Islam dan Yahudilah yang memelihara faham monoteisme yang murni. Monoteisme Kristen dengan faham Trinitasnya dan monoteisme Hindu dengan faham politeisme yang terdapat di dalamnya tidak dapat dikatakan monoteisme murni (1985: 19-22).

Menurut Sidi Gazalba, secara historis kata agama digunakan untuk menyebut Hindu, Buddha yang masuk ke Nusantara, lalu kata agama diterapkan untuk menyebut Islam dan Kristen yang datang kemudian. Namun, Sidi Gazalba menolak mengartikan *din* (Islam) dengan agama. Hal ini, menurutnya, akan menimbulkan kekaburan dan kekacauan pengertian, karena agama adalah lambang untuk Hinduisme dan Buddhisme, sementara Islam berbeda dengan sistem kepercayaan yang datang lebih dahulu ke Nusantara itu. Sidi Gazalba juga menolak mengartikan *din* dengan *religion* atau religi. Karena kata religi dibawa oleh orang Nasrani yang memasuki Nusantara, yang diterjemahkan dengan agama yang sudah menjadi bahasa Melayu (1978: 114-5).

Karena kata agama digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyebut Hindu, Buddha, Islam dan Kristen. Untuk membedakan Islam dari agama-agama lainnya, Sidi Gazalba membuat polarisasi: agama yang benar dan agama yang salah. Ia memberikan ciri-ciri agama yang benar menurut kriteria Islam. Ciri-ciri agama yang benar adalah diwahyukan oleh Tuhan Yang Esa, melalui UtusanNya, memiliki kitab suci yang otentik dan bersifat universal (1978: 136-40).

Kedua intelektual Muslim itu juga melakukan legitimasi atas teori evolusi agama dari antropologi. Evolusi masyarakat manusia yang dijelaskan oleh antropologi Barat dari masyarakat primitif sampai masyarakat modern memberi inspirasi kepada keduanya untuk melegitimasi secara 'ilmiah' kebenaran konsep monoteisme Islam.

Harun Nasution menjelaskan bahwa agama ada yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif berevolusi dari tahap dinamisme ke tahap animisme, dari animisme ke tahap politeisme, dari tahap politeisme ke tahap henoteisme. Dalam masyarakat yang sudah maju agama-agama itu sudah tidak dianut lagi, tetapi mereka menganut agama monoteisme, agama tauhid (1985: 11-15).

Senada dengan pendapat di atas, Sidi Gazalba juga merasa mendapat angin segar dari antropologi, bahkan ia memanfaatkan teori antropologi tentang evolusi agama untuk membenarkan konsep monoteisme Islam. Ia menyatakan:

Mula-mula yang dipercayai Yang Kudus itu adalah tenaga sakti (supernatural power), yang diistilahkan dalam antropologi dengan "mana". ...Mana adalah zat yang pasif. Apabila zat itu dipercayai sebagai mempunyai kemauan, kepercayaan kepada mana meningkat menjadi kepercayaan kepada anima (jiwa). Berubahlah kepercayaan kepada serba tenaga atau dinamisma (dinamo= tenaga), istilah antropologi terhadap sistem kepercayaan kepada mana menjadi serbajiwa atau animisma....Meningkatlah kepercayaan serbajiwa kepada serba banyak-jamak dewa atau politeisma...dilanjutkan oleh proses pemilihan satu dewa dari jumlah dewa yang banyak itu. Inilah yang disebut serba pilihan dewa atau henoteisma. ...menuju kepada serbaesa Tuhan atau monoteisme....Filsafat tentang Yang Kudus ber-evolusi kepada monoteisme. Rupanya inilah konsep yang sempurna. Tetapi akal ternyata tidak mampu mencapai monoteisme itu, ia hanya berhasil mendekatinya. ...Monoteisma murni atau monoteisma mutlak ...adalah konsep yang sempurna yang tak mungkin dihasilkan oleh akal. Konsep itu hanya diajarkan oleh naqal, diturunkan sebagai wahyu oleh Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Konsep inilah yang menjadi konsep Ketuhanan agama langit (1978: 127-28).

Istilah animisme dan identifikasinya dengan bukan monoteisme sebenarnya pada awalnya adalah hasil proyek 'ilmiah' antropologi dan dibenarkan oleh Kristen. Istilah ini lahir dari E.B.Tylor, sarjana antropologi Inggris, dalam kitabnya *Primitive Cultures* (1873), yang hidup pada masa kolonisasi negara-negara Barat terhadap masyarakat jajahan yang dianggap primitif. Ketika Tylor –menurut Daniel L. Pals dalam kitabnya *Seven Theories of Religion*– menemukan contoh agama monoteis, ia berasumsi bahwa animisme merupakan satu tahap perkembangan pemikiran menuju politeisme dan berakhir pada monoteisme (1996: 46).

Teori evolusi Tylor itu –meminjam uraian Kees W. Bolle dalam artikelnya *Animism and Animatism*– merupakan produk imperialisme dan kolonialisme Inggris. Baik semangat keagamaan (baca: Kristen) dan nasionalisme bertemu dan menyatu dalam teori Tylor itu. Akhirnya, pandangan teologis terhadap istilah ilmiah itu (baca: animisme) menjadikannya sinonim dengan terma yang ada sebelumnya, yaitu “kafir” (pagan).

Penilaian yang Eropa sentris atau Kristen sentris itu masuk ke Indonesia melalui antropologi, dan mendapat dukungan agama Islam. Sebagian orang Kristen dan Islam –untuk tidak menyebut seluruhnya– di Indonesia memandang suku-suku pribumi sebagai orang kafir dan tidak beragama. Dan mereka menjadi lahan rebutan untuk dipindahkan menuju agama monoteis atau Kristenisasi dan Islamisasi.

Usaha kedua teolog Muslim itu mengintrodusir ciri-ciri agama Islam ke dalam konsep agama, yaitu monoteis, mempunyai kitab suci dan Rasul, telah mengeksklusi agama-agama lain. Konsep monoteisme mumi bukan hanya telah menendang agama-agama suku, tapi juga Hindu dan Kristen. Konsep kitab suci telah mengeluarkan agama-agama suku dari eksistensinya sebagai agama. Sementara konsep Rasul telah mengeksklusi bukan hanya agama-agama suku tapi juga Hindu. Dan tafsir teologis atas teori animisme telah melahirkan citra bahwa agama-agama suku adalah “syirik” dan “kafir”.

Konsep agama yang diintrodusir para teolog Muslim di Indonesia telah mempersempit bahkan hampir tidak memberikan ruang gerak sama sekali bagi agama-agama tertentu. Namun, kriteria agama yang diajukan para teolog Muslim itu tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Ofisialisasi agama-agama seperti Kristen, Hindu dan Buddha di samping Islam tidak sepenuhnya mengikuti kriteria Islam. Namun demikian, ofisialisasi agama juga telah membuat eksistensi dan posisi agama-agama tertentu pada pilihan yang sulit. Mereka harus masuk ke dalam kategori salah satu agama resmi atau eksistensi mereka tidak diakui.

E. Islamisasi vs *Civil Religion*

Sebagian orang, terutama para pembela pluralisme, keberatan dengan konsep agama yang didominasi Islam itu (*Islam-dominated meaning*). Menurut mereka, Islamisasi konsep agama adalah kontra-produktif terhadap atau paradoks dengan semangat toleransi, dialog dan kerjasama antar umat beragama. Pada tataran retorika, ajakan untuk bersikap toleran, dialogis dan kooperatif memang manis didengar. Tapi pada tataran realitas, pemberian kriteria pada agama dengan ciri-ciri Islam membuat ajakan toleransi, dialog dan kerjasama menjadi semu belaka. Pemaksaan secara terus-menerus kriteria itu oleh para pengambil kebijakan di negeri ini bukan hanya mengkhianati ko-eksistensi antar agama, tapi juga jauh dari harapan untuk melakukan pro-eksistensi; membuat agama orang lain menjadi ada, atau meng-ada-kan agama orang lain.

Upaya Islamisasi konsep agama juga mendapat tantangan dari mereka yang mengusung konsep *civil religion*. Istilah agama sipil berasal dari skema evolusi agama Robert N. Bellah. Tesisnya tentang *civil religion* itu tidak lepas dari identifikasinya terhadap serangkaian evolusi agama dalam artikelnya "*Religious Evolution*" (1964). Bellah mencatat lima tahap dalam evolusi agama: primitif, purbakala, historis, modern awal, dan modern (Sanderson, 1993: 521). Skema evolusi agama Bellah berbeda dengan teori evolusi agama sebelumnya, yang dikemukakan antara lain oleh E.B. Tylor, Andrew Lang dan Marret. Ia tidak menyatakan bahwa orang-orang purbakala

kurang atau lebih agamis dari orang-orang sesudahnya. Bellah juga tidak menyatakan bahwa Tuhan (*deity*) berevolusi. Namun, simbolisasi agamalah yang menjadi semakin kompleks, karena masyarakat berkembang semakin kompleks. (Capps, 1995: 100-101). Ketika masyarakat semakin kompleks, agar komponen-komponen dan kualitas-kualitas keagamaan tetap dapat bertahan, maka para penganut agama harus berusaha supaya ekspresi keagamaan dan pemahaman keagamaan mereka selalu sejalan (*always coordinant*) dengan tatanan sosial.

Karena dunia modern sangat kompleks, agama pada masa modern tetap meneruskan pembedaan yang dilakukan agama-agama historis antara dunia sekuler dan dunia agama, maupun perhatiannya yang kuat akan keselamatan, tetapi mengubah cara mencapai keselamatan itu. Bukannya dengan menghindari dunia ini, keselamatan itu dapat dicapai melalui keterlibatan langsung dalam masalah-masalah dunia (Sanderson, 1993: 521-23).

Agama mencari cela-cela untuk masuk dalam wilayah sekuler dan berintegrasi dengannya. Masa depan sebuah negara diinterpretasikan dengan simbol-simbol keagamaan. Keberadaan sebuah negara dilegitimasi oleh agama. Para pejabat disumpah dengan simbol-simbol keagamaan. *Civil society merger* dengan *civil religion*. Misalnya, ada larangan penjualan minuman keras yang harus ditaati oleh semua anggota masyarakat. Penutupan tempat-tempat hiburan pada bulan suci. Sertifikasi makanan halal (*halal food*). Konsensus untuk menghubungkan negara dengan agama dengan pernyataan bahwa negara berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Semenjak kemerdekaan Indonesia, sebuah elemen baru dimasukkan ke dalam wajah agama dalam bangsa secara luas. Dengan meminjam istilah dari Bellah di atas, elemen baru ini adalah "civil religion", yaitu doktrin *teistik* yang melegitimasi proyek nasional negara Indonesia (Atkinson, 1987: 174).

Yang Bellah maksud dengan *civil religion* adalah: "...*quasi-religious beliefs that link people to society and country. "Civil" refers to the nonreligious aspects of life (what Durkheim called the profane), whereas "religion" refers to*

a system of beliefs or faith (the sacred). Strictly speaking, combining the two words into a single term is a nonlogical union of opposites, but as Bellah intended, the term has come to mean the combination of the profane with the sacred” (Curry, 1997: 326).

Maksudnya, agama sipil adalah keyakinan serupa-religi yang menghubungkan orang-orang kepada masyarakat dan negeri. “Sipil” merujuk kepada aspek-aspek kehidupan yang non-religius (Durkheim menyebutnya *the profane*), sementara “religi” merujuk kepada sistem kepercayaan atau keyakinan (*the sacred*). Sebenarnya, menggabungkan keduanya ke dalam suatu istilah tunggal adalah tidak logis, namun sebagaimana yang dimaksud Bellah, istilah itu bermakna kombinasi yang sekuler dan yang suci.

Kelompok yang mengusung agama sipil memandang Pancasila sebagai titik temu semua agama dan unsur bangsa Indonesia. Semua agama ditampung dalam Pancasila, begitu juga semua unsur kebudayaan Indonesia. Karena itu, kriteria agama yang diusung oleh tokoh-tokoh Islam tidak semuanya bisa diterima. Menurut kelompok ini, Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama, tetapi perpaduan antara keduanya.

F. Belum Beragama

Islam dan Kristen terkenal sebagai agama yang ekspansif; sebagian masing-masing pemeluknya berusaha menambah jumlah pengikut dengan mengajak orang lain masuk Islam atau Kristen. Sifat keduanya yang ekspansif ini kadang menimbulkan konflik antara kedua pemeluknya, terutama bila salah satu pihak melakukan ekspansi di kalangan pemeluk yang lain. Pihak Islam menyatakan pihak lain melakukan Kristenisasi umat Islam, pihak Kristen juga menyatakan pihak Islam telah melakukan upaya mengajak umat Kristiani untuk pindah ke Islam. Konflik ini melahirkan perdebatan tentang kode etik dakwah Islam dan misi Kristen. Apakah boleh berdakwah atau melakukan misi terhadap orang yang sudah beragama? Perdebatan ini muncul pada konferensi tahun 1967 antara tokoh-tokoh Islam dan Kristen di Indonesia dan berakhir pada jalan buntu.

Di sini saya tidak ingin menganalisis kenapa terjadi *deadlock*. Saya hanya ingin melihat implikasi dari perdebatan itu pada konsep agama. Pertanyaannya kalau ada klasifikasi orang yang sudah beragama berarti ada kelompok orang yang belum beragama. Jika demikian, siapa orang yang "belum beragama"? Saya tidak menggunakan istilah "tidak beragama" karena di Indonesia setiap orang harus beragama. Kalau seseorang dianggap tidak beragama maka harus memilih di antara agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Kalau seseorang atau sekelompok orang meyakini bahwa yang mereka peluk adalah agama, secara administratif akan difasilitasi apabila yang mereka yakini diakui oleh pemerintah. Jika tidak diakui oleh pemerintah dan ingin mendapatkan fasilitas dari pemerintah, maka mereka harus bergabung dengan salah satu agama yang diakui.

Kembali kepada pertanyaan tentang siapa orang yang belum beragama. Kemungkinan pertama, jika yang dimaksud dengan agama adalah yang diakui oleh pemerintah, maka orang yang sudah beragama adalah orang-orang yang memeluk agama-agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia. Orang-orang yang bukan pengikut agama-agama dalam klasifikasi itu dapat disebut sebagai orang-orang yang belum beragama. Kalau dakwah di kalangan orang-orang yang sudah beragama dapat menimbulkan konflik, objek dakwah dapat digeser kepada orang-orang yang belum beragama. Yang dimaksud dakwah di sini adalah mengajak masuk kepada Islam.

Kalau kita mengikuti alur teori evolusi agama dari Tylor dan melegitimasinya secara teologis bahwa orang-orang dari suku-suku tradisional yang masih mempunyai kepercayaan Animis adalah orang-orang yang belum beragama, maka mereka juga dapat dijadikan sebagai objek dakwah. Karena itu mereka juga adalah objek dakwah yang bisa diajak untuk masuk atau memeluk agama Islam.

G. Kesimpulan

Merumuskan ulang objek dakwah atau orang-orang yang menjadi sasaran untuk diajak masuk ke dalam Islam dalam konteks bangsa Indonesia dalam kerangka negara kesatuan merupakan upaya meletakkan dakwah secara aktual. Hal ini penting untuk menghindari konflik antar umat beragama, terutama bagi mereka yang memeluk agama-agama yang berkarakter ekspansif. Perumusan apa itu agama dan siapa orang yang beragama adalah salah satu contoh usaha dakwah konseptual melalui medium bahasa baik pada tingkat konstitusional, wacana publik dan akademis. Upaya pemaknaan konsep agama dengan memasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya adalah usaha berbagai pihak terutama di bidang intelektual dan politik. Kerjasama dakwah konseptual dan politik harus dikerjakan dalam rangka *nation-building* yang masih terus dalam proses.

Daftar Kepustakaan

- Afif, Rusydi (ed.). 1983. *Hamka Membahas Soal-Soal Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Atkinson, Jane Monnig. "Religions in Dialogue: The Construction of an Indonesian Minority Religion", dalam Rita Smith Kipp dan Susan Rodgers (eds.). 1987. *Indonesian Religions in Transition: 171-186*. Tucson: The University of Arizona Press.
- Baldwin, Thomas. 2000. "Analytical philosophy," dalam Concise Routledge, *Encyclopedia of Philosophy*. London: Routledge.
- Capps, Walter H. 1995. *Religious Studies: The Making of a Discipline*. Minneapolis: Fortress Press.
- Curry, Timothy J. Robert M Jiobu dan Kent P Schwirian. 1997. *Sociology for the Twenty-First Century*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Gazalba, Sidi. 1978. *Ilmu, Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Grayling, A. C. 1997. *An Introduction to Philosophical Logic*, edisi ke-3. Oxford: Blackwell.
- Hospers, John. 1990. *An Introduction to Philosophical Analysis*, edisi ke-3. London: Routledge.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I. Jakarta: UI-Press.
- Pals, Daniel L. Seven. 1996. *Theories of Religion*. New York & Oxford: Oxford University Press.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, terjemahan Farid Wajidi. Jakarta: Rajawali Press.
- Sekretariat Negara RI. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, edisi ke-3. Jakarta: Sekretariat Negara RI.